PENYEBAB KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI MALUKU

Ketimpangan wilayah awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Ketimpangan wilayah merupakan salah satu dampak dari awal pembangunan itu sendiri dan apabila tidak segera diatasi maka akan berdampak buruk bagi wilayah-wilayah yang tertinggal.

Buku ini merupakan upaya untuk membedah persoalan ketimpangan wilayah secara umum dan secara khusus pada propinsi Maluku dengan menggunakan sample 5 Kabupaten/kota di Propinsi Maluku.

Tujuan adalah untuk menganalisis ketimpangan wilayah antar Kabupaten/ Kota di Propinsi Maluku studi kasus pada daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Kota Madya Tual dengan menggunakan data panel tahun 2010 – 2016 yang digunakan dalam menganalisis faktor Determinan yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Propinsi Maluku.

Dalam pembahasan ini juga didasarkan pada teori-teori ekonomi yang selama ini dipakai dalam teori ketimpangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

PENYEBAB KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI MALUKU

Balthasar Malindar

Balthasar Malindar

PENYEBAB KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI MALUKU

PENYEBAB KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI MALUKU

Balthasar Malindar

pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

**PENYEBAB KETIMPANGAN WILAYAH
DI PROVINSI MALUKU**

Penulis:

Balthasar Malindar

Editor

Wiwit Kurniawan

ISBN : 978-623-6837-13-9

Design Cover :

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Nisa Falahia

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin
penerbit

KATA PENGANTAR

Masalah ketimpangan Pendapatan merupakan bagian yang penting dalam mengukur pembangunan ekonomi, alasannya karena dengan naiknya distribusi pendapatan maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini disesuaikan dengan pendapat oleh Sukirno (2000, hal.5) bahwa pembangunan ekonomi adalah merupakan proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini menunjukkan bahwa dalam distribusi pendapatan yang terjadi, bahwa hanya 20% penduduk yang memiliki distribusi pendapatan yang tinggi, sedangkan 80% bagi penduduk yang menengah ke bawah (Ahlwwalia, 1997)

Melihat tingkat presentasi ketimpangan pendapatan, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Hal ini dilakukan oleh P. Estudillo (1991) yang menentukan bahwa Populasi, upah tenaga kerja, Pendapatan domestic Oregional Brotu, dan pendapatan daerah berpengaruh terhadap Pendapatan. Lebih lanjut kajian yang dilakukan oleh Adrian Coto (2006) yang menemukan pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor industry dan upah minimum tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Tujuan buku ini adalah untuk menganalisis ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota di Propinsi Maluku studi kasus pada daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Kota Madya Tual dengan menggunakan data panel tahun 2010 - 2015. Kajian dan analisis data menggunakan uji Huasman dalam memilih model terbaik untuk metode *General Last Square (GLS)* dan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa *Fix Effects Model (FEM)* yang digunakan dalam menganalisis faktor Determinan yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Propinsi Maluku

Berdasarkan hasil estimasi tersebut bahwa variabel Jumlah Penduduk (X_1) berpengaruh positif 9.227813 dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah kabupaten kota. Sedangkan variabel *Product Domestic Regional Brotu* (X_2) berpengaruh negative

dan signifikan, dengan nilai -1.60010 dan variabel pengeluaran pemerintah (X_3) berpengaruh dengan nilai 0.000758 dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah. dari hasil estimasi Koefisien Determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.902404, yang mengandung arti bahwa variasi variable ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson) mampu dijelaskan oleh variable jumlah penduduk, PDRB Pengeluaran Pemerintah sebesar 90% sedangkan sisanya sebesar 10% dijelaskan oleh variable-variabel lainnya di luar model.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dari para pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua. Terima Kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Ketimpangan Pembangunan di Indonesia	1
B. Ketimpangan di Provinsi Maluku	2
BAB II PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN	
WILAYAH	7
A. Teori Pertumbuhan Ekonomi	7
B. Teori Populasi Penduduk.....	10
C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	13
D. Pengeluaran Pemerintah	14
E. Ketimpangan Antar daerah	19
1. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Ketim-	
pangan Wilayah	27
2. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi (Indikator	
PDRB) dengan Ketimpangan Wilayah	29
3. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan	
Ketimpangan Wilayah	30
BAB III GAMBARAN WILAYAH DAN POTENSI BEBERAPA	
KABUPATEN DI MALUKU	32
A. Gambaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat.....	32
1. Keadaan Geografis	32
2. Topografi dan Iklim	33
3. Kependudukan	34
4. Perekonomian	34
5. Pengeluaran Pemerintah	35
B. Gambaran Kabupaten Maluku Tenggara	36
1. Keadaan Geografis	37
2. Topografi dan Iklim	37
3. Kependudukan	37
4. Perekonomian	38
5. Pengeluaran Pemerintah	39
C. Gambaran Kabupaten Kepulauan Aru	40
1. Keadaan Geografis	41
2. Topografi dan Iklim	41
3. Kependudukan	41

4. Perekonomian	42
5. Pengeluaran Pemerintah	43
D. Potensi Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya	44
1. Keadaan Geografis	45
2. Topografi dan Iklim	45
3. Kependudukan	45
4. Pengeluaran Pemerintah	46
E. Potensi Wilayah Kota Madya Tual.....	47
1. Keadaan Geografis	47
2. Topografi dan Iklim	48
3. Kependudukan	48
4. Pengeluaran Pemerintah	49
BAB IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KETIM- PANGAN DI MALUKU	50
A. Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Maluku	50
1. Potensi Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat	55
2. Potensi Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara	56
3. Potensi Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru	57
4. Potensi Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya	58
5. Potensi Wilayah Kota Tual.....	59
B. Ketimpangan Wilayah	60
BAB V FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETIMPANGAN WILAYAH	64
A. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Wilayah	64
B. Pengaruh PDRB Terhadap Ketimpangan Wilayah.....	66
C. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Wilayah	67
BAB VI PENUTUP	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Ketimpangan Pembangunan di Indonesia

Pada mulanya upaya pembangunan diidentifikasi dengan upaya peningkatan pendapatan per capita atau disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita, diharapkan mampu memecahkan permasalahan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan melalui *trickle down effect* (Kuncoro, 2010). Pada awal tahun 1960-an, sebagian besar Negara Sedang Berkembang (NSB) yang mengalami tingkat pertumbuhan tinggi menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi semacam itu hanya memberikan sedikit manfaat dalam memecahkan masalah kemiskinan serta distribusi pendapatan (Arsyad, 2010) permasalahan pembangunan saat ini terutama di NSB bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan distribusi.

Tadaro dan Smith (2006) menyebut bahwa tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi tingginya dan mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi masyarakat akan menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat kemudian dapat mengurangi kemiskinan.

Pendapatan perkapital merupakan indikator yang paling sering digunakan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu wilayah. Pendapatan per kapita juga digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu wilayah dari masa ke masa dan perbandingan kinerja perekonomian suatu wilayah dengan wilayah lain. (Arsyad, 2010), Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dengan jalan membagi pendapatan regional pada suatu periode tertentu dengan jumlah penduduk

pada periode yang sama, ketidakmerataan pendapatan pada suatu wilayah tertentu dapat mengakibatkan ketimpangan pembangunan pada wilayah tersebut.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan berbagai faktor yang terdapat pada masing-masing daerah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan daerah tersebut menjadi berbeda, oleh karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada suatu proses pembangunan suatu wilayah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar wilayah dapat membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan antar wilayah. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan atau memicu terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah tersebut (Sjafrizal, 2008) adalah: faktor Geografis, faktor historis, faktor Politis, faktor Kebijakan, faktor Administratif, faktor sosial dan faktor ekonomi.

B. Ketimpangan di Provinsi Maluku

Provinsi Maluku terbagi atas 9 (Sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota madya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan kota Madya Tual merupakan daerah yang secara geografis sangat berdekatan, dari faktor historisnya dari budaya dan kehidupan perekonomiannya juga dapat dikatakan hampir sama serta faktor sosial dan ekonomi.

Dapat dikatakan juga bahwa perbedaan faktor ekonomi yang menyebabkan kesenjangan antar wilayah adalah perbedaan kuantitas dari faktor produksi yang dimiliki seperti lahan, infrastruktur, tenaga kerja, modal organisasi dan perusahaan. Wilayah yang mempunyai faktor ekonomi yang baik dapat mendorong untuk menjadi daerah yang lebih maju dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, sedangkan daerah lainnya akan tertinggal.

Berdasarkan data yang diambil dari Badan pusat Statistik dari Propinsi Maluku (2010-2016) bahwa dapat dilihat ada kenaikan jumlah penduduk, PDRB dan Pengeluaran Pemerintah dari tahun 2010-2016 di beberapa Kabupaten/Kota pada Propinsi Maluku

Tabel 1.1
Data Jumlah Jiwa, PDRB- Per Kapita - ADHK dan
Pengeluaran Pemerintah Pada Kab. MTB, MARLA,
KEPULAUAN ARU, MBD dan Kota Tual Provinsi Maluku

Kabupaten/ Kota	Tahun	Jumlah Penduduk	PDRB	Pengeluaran Pemerintah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	2010	105804	9267643567	467.4065
	2011	106768	984134441	509.9391
	2012	107827	1045590186	511.8317
	2013	108665	1090957199	582.4785
	2014	109589	1146146611	692.2884
	2015	110425	1196642626	810.7889
	2016	110425	128364585	1048.095
Kabupaten Maluku Tenggara	2010	96931	1203761469	445.6232
	2011	97302	1270868461	402.0112
	2012	97823	1353433385	477.0646
	2013	98073	1428069275	530.8393
	2014	98474	1510079981	609.4206
	2015	98684	1590328686	649.3293
	2016	99086	1676032245	982.5436
Kabupaten Kep. Aru	2010	84632	1593261473	498.2163
	2011	86018	1649822863	531.0967
	2012	87423	1750535534	469.0897
	2013	88739	1830497019	558.2304
	2014	89995	1926831502	701.4925
	2015	91277	198893397	754.2787
	2016	92578	2070534403	979.9048
	2010	84632	8551795757	384.9554
	2011	86018	9025363636	487.1381

Kabupaten Maluku Barat Daya	2012	87423	963184773	540.6589
	2013	88739	1021615254	625.3144
	2014	89995	1160392362	738.482
	2015	91277	1169705592	762.5259
	2016	72010	1239131426	113.215
Kota Tual	2010	58518	1503498428	332.2445
	2010	60289	1545431538	336.5212
	2011	62103	1618830894	347.4393
	2012	64032	1665261588	389.7892
	2013	65882	1718941805	444.7366
	2014	67783	1765590384	381.1556
	2015	69689	1815478354	381.1166
	2016	105804	9267643567	695.849

Dapat dilihat juga bahwa daerah yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah berdasarkan PDRB di tahun 2016 adalah kabupaten Maluku Barat Daya dengan jumlah sebesar 8.9229854 dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, ini dapat diasumsikan faktor-faktor produksi belum berjalan dengan baik, kabupaten kepulauan Aru memiliki tingkat PDRB yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yaitu sebesar 19.168593. Dapat dilihat juga bahwa data jumlah penduduk di tahun 2016 yang paling sedikit adalah kota madya Tual dengan jumlah 68162 jiwa, dan yang paling terbanyak adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan jumlah jiwa sebesar 120425. Keterlibatan jumlah penduduk dalam pembangunan perekonomian juga merupakan hal yang penting dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan. Dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat akan mengakibatkan jumlah tenaga kerja yang pesat. Pengeluaran pemerintah merupakan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat belanja langsung dan tidak langsung, dari data tersebut dapat lihat bahwa pengeluaran pemerintah yang paling kecil adalah kota madya Tual dengan jumlah sebesar Rp. 695.849 Miliar sedangkan pengeluaran pemerintah

yang besar terdapat pada kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar Rp. 810.7889 Miliar.

Pada tahapan awal pembangunan, perbedaan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar daerahnya telah mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Namun dalam jangka panjang, ketika faktor-faktor produksi di daerah semakin dioptimalkan dalam pembangunan semakin meningkatnya pendapatan per kapita rata-rata di setiap daerah seiring dengan waktu yang berjalan. Kondisi tersebut sesuai dengan hipotesa Kuzney yang dikenal dengan hipotesa U terbalik yang menyatakan bahwa ketimpangan wilayah dan tingkat pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang berbentuk U terbalik seiring waktu yang berjalan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan kota Madya Tual merupakan daerah yang secara geografis sangat berdekatan, dari faktor historisnya dari budaya dan kehidupan perekonomiannya juga dapat dikatakan hampir sama serta faktor sosial dan ekonomi, ini dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang tidak begitu jauh dan tingkat pertumbuhan PDRB dan pengeluaran pemerintah yang hampir sama, dilihat dari jumlah dilihat dari jumlah penduduk dalam hubungan dengan PDRB serta Pengeluaran pemerintah pada lima kabupaten kota di provinsi Maluku, ini dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk yang cukup relative banyak tidak seimbangan dengan PDRB yang artinya bahwa kurangnya penyerapan kerja, dan kurang pemanfaatan faktor-faktor produksi sehingga dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah yang berdampak pada pengeluaran pemerintah sehingga dapat menimbulkan ketimpangan wilayah pada lima kabupaten kota di provinsi Maluku.

Dapat dikatakan juga bahwa perbedaan faktor ekonomi yang menyebabkan kesenjangan antar wilayah adalah perbedaan kuantitas dari faktor produksi yang dimiliki seperti lahan, infrastruktur, tenaga kerja, modal organisasi dan

perusahaan. Wilayah yang mempunyai faktor ekonomi yang baik dapat mendorong untuk menjadi daerah yang lebih maju dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, sedangkan daerah lainnya akan tertinggal.

Pada dasarnya kesenjangan pada standar hidup relative dari seluruh masyarakat, sebab kesenjangan antar wilayah adalah perbedaan sumber daya. Perbedaan ini menyebabkan tingkat pembangunan di daerah berbeda-beda sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang Analisis Determinan Ketimpangan Wilayah antar Kabupaten Kota pada Propinsi Maluku. Apapun tujuan di dalam kajian buku ini adalah untuk Mengetahui seberapa besar ketimpangan wilayah Pada Empat Kabupaten dan satu Kota Madya di Propinsi Maluku. Untuk mengetahui seberapa Besar Pengaruh jumlah Penduduk, terhadap ketimpangan wilayah. Untuk Mengetahui seberapa besar Pengaruh PDRB terhadap ketimpangan wilayah. Serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran Pemerintah, Terhadap ketimpangan wilayah.

BAB II

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Istilah pertumbuhan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di Negara-Negara berkembang. Sebagai ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut: *economic development is growth plus change*, yaitu pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan kata lain dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi misalnya usaha merombak sector pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pendapatan.

Yang perlu diingat, pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekadar sebagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi per tahun saja. Pembangunan ekonomi itu bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu Negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan diatas, maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk di suatu Negara meningkat dalam jangka panjang (Arsyad, 2010).

Menurut Todaro (2006), pembangunan di semua Negara memiliki tiga sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan

2. Meningkatkan taraf hidup, termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan memperhatikan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Semua itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi semata, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri, baik individu maupun bangsa.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap – sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan Negara lain, tetapi juga sumber – sumber kebodohan dan penderita manusia.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu dari indikator keberhasilan suatu proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara atau wilayah. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan ekonomi. pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan kapasitas penawaran atau produksi barang dan jasa yang berdasarkan pada peningkatan teknologi, penyesuaian ideologi dan kelembagaan yang dibutuhkan. Sedangkan pembangunan ekonomi mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan dan alokasi sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh (Todaro, 2006).

Sumitro Djojohadikusumo (1987) dalam Budiantoro (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sedangkan menurut Kuznets dalam Todaro (2006) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan

kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Menurut pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List dan Rostow, Pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian mulai dari perekonomian bersifat tradisional yang bergerak di sektor pertanian dimana produksi bersifat subsistem, hingga akhirnya menuju perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri manufaktur.

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik seperti Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan, sedangkan menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi atau wiraswasta (entrepreneur) (Pratama, 2010). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Kuncoro, 2006).

Menurut Todaro (2006), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Akumulasi modal

Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resources). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian didivestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas

ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi.

2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (*labor force*) secara tradisional telah dianggap sebagai factor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

3. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni:

- a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
- b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja atau hemat modal, yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.
- c. Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

B. Teori Populasi Penduduk

Adam Smith merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh.

Dengan kata lain alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Mulaydi (2003), teori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentu kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya alam (tanah) tidak ada arti kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengelola sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik dari Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah permulaan pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi bertumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi.

Sesudah Adam Smith Thomas Robert Malthus dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pembangunan pemikiran – pemikiran ekonomi. Buku Malthus yang dikenal paling luas adalah *Principles Of Population*. Menurut Mulyadi (2003), dari buku tersebut akan dilihat bahwa meskipun Malthus termasuk salah seorang pengikut Adam Smith, tidak semua pemikiran sejalan dengan Smith. Disitu di satu pihak Smith optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi. Sebaliknya Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama tetap jumlahnya. Dalam banyak hal justru luas tanah bagi pertanian berkurang karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik dan bangunan lainnya serta pembuatan jalan. Menurut Malthus manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Malthus tidak percaya bahwa teknologi mampu berkembang lebih cepat daripada pertumbuhan manusia. Sehingga perlu dilakukan pembatasan dalam jumlah penduduk. Pembatasan ini disebut Malthus sebagai pembatasan moral.

Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang didasarkan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (*equilibrium*). Dalam posisi keseimbangan semua sumber daya termasuk, tenaga kerja, akan digunakan secara penuh. Dengan demikian bahwa sistem yang didasarkan pada bahwa tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, dari pada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kesediaan bekerja dengan memperoleh tingkat upah yang lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk lebih mempekerjakan mereka lebih banyak. Kriteria Jhon Maynard Keynes terhadap system klasik salah satunya adalah tentang pendapatan yang mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja penuh.

Teori Harrod-Domar dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini dalam Mulyadi (2003), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi hanya dapat meningkatkan bila sumber daya lain (modal fisik) membesar. Di samping itu dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan per kapita asalkan modal fisiknya meningkat. Model yang sama juga dikemukakan oleh model Solow dimana dalam model ini dipakai suatu fungsi produksi Cobb-Douglas. Angkatan kerja diasumsi tumbuh secara geometris dan full employment selalu tercapai. Tetapi, dalam model ini pekerja sudah memperluas secara jelas sebagai salah satu faktor produksi, dan bukan sekedar pembagi. Dalam model ini juga dilihat substitusi antara modal fisik dan pekerja.

Boserup berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk justru menyebabkan dipakainya sistem pertanian yang lebih insentif di suatu masyarakat dan meningkatnya output di sector pertanian, juga berpendapat bahwa pertambahan penduduk berakibat dipilihnya system teknologi pertanian pada tingkatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, inovasi

(teknologi) ada lebih dahulu. Inovasi itu hanya menguntungkan bila jumlah penduduk lebih banyak. Inovasi menurut Boserup (2003), dapat meningkatkan output bekerja, tetapi hanya dilakukan bila jumlah pekerjanya banyak. Pertumbuhan penduduk justru menolong diterapkan suatu inovasi (teknologi) baru (Mulyadi, 2003).

Dari keseluruhan teori tenaga kerja dan pertumbuhan penduduk yang mendominasi sebagian besar teori-teori pembangunan pada tahun 1950-an dan 1960-an, dan pada awal tahun 1980-an dikenal bentuk aliran ekonomi sisi penawaran atau *supply-side economic*, yang memfokuskan pada kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan output nasional melalui akumulasi modal. Karena model ini menghubungkan tingkat penyediaan kesempatan kerja dengan tingkat pertumbuhan GMP, artinya dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja, untuk memaksimalkan pertumbuhan GNP dan kesempatan kerja sangat terbuka sehingga distribusi pendapatan akan merata di setiap daerah dan dapat mengurangi ketimpangan wilayah tersebut.

Ada pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dimana kondisi dan kemajuan penduduk sangat erat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi. Penduduk di satu pihak dapat menjadi pelaku atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi lain dapat menjadi sasaran atau konsumen bagi produk yang dihasilkan (Musfidar 2013).

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Untuk menghitung angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di